

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penerapan Denda Pada Akad *Murabahah* Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fiqh Muamalah” ini ditulis oleh Alfina Faizatul Nihayah, NIM. 126401203107, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Nur Aziz Muslim, M.H.I.

Fokus dalam penelitian ini yakni bagaimana Implementasi Denda pada akad *Murabahah* Lembaga BMT di Tulungagung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda pada pihak manajemen BMT dalam akad *Murabahah* perspektif fiqh muamalah. Fokus utama penelitian adalah perspektif fiqh muamalah dalam mengevaluasi keabsahan dan implikasi penerapan denda tersebut.

Secara keseluruhan, pentingnya denda pada akad *Murabahah* di BMT tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan keuangan dan operasional, tetapi juga mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dan membangun budaya keuangan yang berintegritas. Denda berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong anggota BMT agar membayar tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran arus kas dan likuiditas BMT serta menghindari risiko keterlambatan pembayaran yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan lembaga. Denda yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tidak mengandung unsur riba atau penindasan terhadap anggota. Dengan demikian, penerapan denda tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa transaksi berada dalam batas-batas syariah yang diizinkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis terhadap data primer berupa peraturan dan praktek di BMT serta data sekunder dari literatur keuangan syariah dan fiqh muamalah. Penelitian ini dilakukan pada 4 lembaga BMT yang ada di Tulungagung yakni BMT Agawe Makmur, BMT Pahlawan, BMT Istiqomah, dan BMT Nusantara Umat Mandiri. Data hasil penelitian diperoleh dari wawancara kepada para narasumber yang merupakan karyawan BMT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda *Murabahah* di BMT tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan kebijakan yang memenuhi aspek hukum dan moralitas dalam transaksi ekonomi Islam. Penerapan denda pada akad *Murabahah* dapat berbeda antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada kebijakan internal dan interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata kunci : *Murabahah*, Denda, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

The thesis with the title 'Application of Fines in Murabahah Contracts in Payments at BMT Perspective of Muamalah Fiqh' was written by Alfina Faizatun Nihayah, NIM. 126401203107, Faculty of Islamic Economics and Business, Department of Economics, Sharia Banking Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah Tulugagung State Islamic University, supervised by Nur Aziz Muslim, M.H.I.

The focus of the problem in this research is how to implement fines in the BMT Institution Murabahah agreement in Tulungagung. The aim of this research is to find out the practice of applying fines to BMT management in Murabahah contracts from a muamalah fiqh perspective. The main focus of the research is the perspective of muamalah fiqh in evaluating the validity and implications of applying these fines.

Overall, the importance of fines in Murabahah contracts at BMT is not only limited to financial and operational management aspects, but also reflects the institution's commitment to complying with sharia principles and building a financial culture with integrity. Fines function as a mechanism to encourage BMT members to pay on time according to the agreed schedule. This is important to maintain the smooth cash flow and liquidity of BMT and avoid the risk of late payments which could affect the financial stability of the institution. The fines applied must be in accordance with Islamic sharia principles, such as not containing elements of usury or oppression of members. Thus, the application of fines is not only a means of control, but also an effort to ensure that transactions are within the permitted limits of sharia.

The research method used is descriptive analytical with a qualitative approach, involving analysis of primary data in the form of regulations and practices in BMT as well as secondary data from sharia finance literature and muamalah fiqh. This research was conducted at 4 BMT institutions in Tulungagung, namely BMT Agawe Makmur, BMT Pahlawan, BMT Istiqomah, and BMT Nusantara Umat Mandiri. Data from the research results were obtained from interviews with sources who were BMT employees.

The research results show that Murabahah fines at BMT not only aim to enforce payment discipline, but also consider aspects of justice and conformity with sharia principles. The practical implication of this research is to provide guidance for Islamic financial institutions in developing policies that fulfill legal and moral aspects in Islamic economic transactions. The application of fines to Murabahah contracts can differ from one financial institution to another, depending on their internal policies and interpretation of Islamic sharia principles.

Keywords: Murabahah, Fines, Muamalah Fiqh